

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut :

- 1) Dasar Gugatan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu:
 - a. Adanya diskriminasi usia
 - b. Tidak menghalangi hak-hak konstitusional individu yang memenuhi syarat
 - c. Pejabat publik tidak boleh terhambat oleh ketidakpastian usia
 - d. Seseorang yang telah terpilih dan menjabat dalam periode eksekutif sebelumnya telah terbukti dan berpengalaman dalam memimpin.
 - e. Terciderainya satu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama
 - f. Gibran Rakabuming Raka, telah menunjukkan prestasi signifikan dalam pemerintahan semasa menjabat di Walikota Surakarta periode 2020-2025
 - g. Kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat Presiden maupun Wakil Presiden tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*)

- 2) Dalam memutus perkara tersebut terdapat 3 bagian Hakim dengan pertimbangan hakim:
 - a. Pertimbangan Hakim Mayoritas: Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial dalam kontestasi pemilu sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebaiknya batas usia tidak dipahami secara tunggal.
 - b. Pertimbangan Hakim dengan Alasan Berbeda (Concurring Opinion): Pengalaman sebagai kepala daerah dapat menjadi indikator penting dalam menilai kelayakan seorang calon untuk menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden, mengingat pengalaman tersebut mencerminkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan dan menyelesaikan tugas-tugas strategis di tingkat daerah.
 - b. Pertimbangan Hakim dengan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion): Mahkamah diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengubah norma yang telah ditetapkan oleh legislator, melainkan lebih fokus pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan keputusan yang berdampak signifikan pada sistem konstitusi dan kebijakan yang ada.

B. Saran

1. Agar lebih menyeluruh melibatkan generasi muda, Mahkamah dapat merekomendasikan revisi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk menyertakan opsi kualifikasi pengalaman, bukan hanya usia, dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Perlu dilakukan keselarasan antara rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR dengan UUD 1945. Tujuannya adalah untuk

mengurangi permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat sesuai dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.

3. Agar Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan kemungkinan bahwa perubahan batas usia dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Perubahan batas usia dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dalam politik, baik dengan memberi keuntungan yang tidak proporsional kepada kelompok usia tertentu atau memperlemah posisi kelompok lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Latif. 2009 dkk. Buku Ajar *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Total Media. Yogyakarta.
- Budhiati, 2020, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika.
- Maruarar Siahaan 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press. Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014 *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- Susi Dwi Harijanti, 2024, *Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan*. Sinar Grafika.
- Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

C. SUMBER LAIN

- Achmad Nasrudin Yahya, 2023, judul "Denny Indrayana Sebut Putusan MK

soal Batas Usia Capres-Cawapres Tidak Sah”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/18/17170691/denny-indrayana-sebutputusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-tidak-sah>. [diakses tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.20 WIB]

Ateng Syarifudin, 2020 “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*”, Jurnal Pro Justisia, Edisi, IV, Volume 5, Nomor 1, [diakses tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.20 WIB].

databoks, *Hakim MK Silang Pendapat dalam Putusan Usia Minimum Capres-Cawapres* <http://databoks.kadadata.co.id/datapublish/2023/10/17/hakim-mk-silang-pendapat-dalam-putusan-usia-minimum-capres-cawapres> diakses pada tanggal 29 Juni 2024 pada pukul 15.00 WIB.

Helmi Chandra Sy 2023, *Putusan Irasional Mahkamah Konstitusi*, Wordpress, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Johansyah, (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Nanang Sri Darmadi. 2015. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi. Jurnal Pembaharuan Hukum*. Semarang diakses pada tanggal 7 Mei Pukul 15.40 WIB.

Nila Chrisna Yulika (2023), “MK Kembali Bacakan Putusan Perkara Batas Usia Capres-Cawapres Pada Rabu, 29 November 2023”, <https://www.liputan6.com/news/read/5467592/mk-kembali-bacakan-putusanperkara-batas-usia-capres-cawapres-pada-rabu-29-november-2023?page=3>, [diakses tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.20 WIB]

Saifulloh, (2022). Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1).

Subandri, (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1). Johansyah, (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

The Conversation, 3 kegagalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi <http://theconversation.com/3-kegagalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812> diakses pada tanggal 29 Juni 2024 pada pukul 15.40 WIB.

Yan Mahyudin Natsir Rasad, 2023, “Putusan Mahkamah Konstitusi: Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Tetap Berlaku, Keputusan Nomor 90/PUUXXI/2023 Sah dan Mengikat”, <https://kaltim.akurat.co/news/1343345245/putusan-mahkamah-konstitusi-batasusia-calon-presiden-dan-wakil-presiden-tetap-berlaku-keputusan-nomor-90puuxxi2023-sah-dan-mengikat>, [diakses tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.20 WIB]

The Conversation, 3 kegagalan putusan MK dan bagaiman lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi <http://theconversation.com/3-kegagalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812> diakses pada tanggal 29 Juni 2024 pada pukul 15.40 WIB.

